

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DESA LEMBASADA KECAMATAN BANAWA SELATAN KABUPATEN DONGGALA

Putri Anggraini¹⁾, Rizali Djaelangara²⁾, Gita farista³⁾.

¹ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
[*putrianggrainy45@gmail.com*](mailto:putrianggrainy45@gmail.com)

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
[*rizalidj@gmail.com*](mailto:rizalidj@gmail.com)

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
[*gitazhirul26@gmail.com*](mailto:gitazhirul26@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi dari Kebijakan Pencegahan Stunting di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala dengan menggunakan Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter and Van Horn yaitu Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar koordinasi, Sikap pelaksana dan Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Tipe penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dan Dasar penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Informan ditentukan secara *Purposive Sampling* dengan jumlah informasi sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi (pengamatan), Wawancara informal secara mendalam dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder. Analisis Data yang dilakukan dengan Mereduksi data, Model data (*data display*), Penarikan/verifikasi Kesimpulan, pemeriksaan keabsahan data menggunakan Triangulasi Sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada pelaksana kebijakan dan juga masyarakat. Akibatnya banyak masyarakat yang belum mendukung program ini dijalankan dan masih kurangnya fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan posyandu.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pencegahan, Stunting

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the Stunting Prevention Policy at the Lembasada Village Community Health Center, South Banawa District, Donggala Regency, using the policy implementation model proposed by Van Meter and Van Horn. This model covers six dimensions: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agent, communication and coordination, attitudes of implementers, and the social, economic, and political environment. This research is descriptive and uses a qualitative approach. Informants were selected through purposive sampling, totaling four people. Data collection techniques included observation, in-depth informal interviews, and documentation to gather both primary and secondary data. Data analysis followed the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. Data validity was tested using source triangulation. The result show that the implementation of the stunting prevention policy at this location has not yet run optimally. This is evident from the insufficient dissemination of information by the government to both policy implementers and the community. Consequently, many residents have not supported the program, and there is still a lack of facilities to support activities at the integrated health service post (Posyandu).

Keywords : Policy implementation, Prevention, Stunting

Submisi: 13-07-2026
Diterima: 14-07-2026
Dipublikasikan: 08-08-2026

PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu target *Sustainable development Goals* (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke 2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Stunting menggambarkan status gizi yang bersifat kronik pada pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kelahiran.

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi utama pada balita di Indonesia yang belum teratasi. Dalam konsep WHO, stunting merupakan hasil interaksi berbagai faktor yaitu asupan gizi yang kurang dan/kebutuhan gizi yang menangkan, (kemenkes RI,2022)

Stunting tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dicegah, pencegahannya dimulai dengan memenuhi gizi sejak hamil. Ibu yang sedang mengandung harus mengonsumsi aneka ragam pangan untuk pemenuhan energi, protein dan vitamin serta mineral sebagai pemeliharaan, pertumbuhan dan perkembangan janin. Membatasi makanan yang mengandung garam tinggi untuk mencegah hipertensi karena akan meningkatkan risiko kematian janin. Ibu hamil juga harus minum tablet penambah darah sebanyak 90 tablet atau selama masa kehamilan untuk mencegah anemia. Masa remaja juga sudah harus dianjurkan untuk mengonsumsi obat penambah darah sebagai salah satu cara mencegah anemia dimasa akan datang ketika akan menjadi seorang ibu.

Peraturan Bupati Donggala Nomor 29 Tahun 2023 mengatur tentang percepatan penurunan stunting secara terintegrasi. Peraturan ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan peran aktif masyarakat dalam upaya penurunan stunting. Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Donggala melalui pendekatan yang terintegrasi, melibatkan berbagai sektor, dan berfokus pada intervensi spesifik serta sensitif. Puskesmas Lembasada di Kecamatan Banawa Selatan menjadi salah satu unit pelayanan kesehatan yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan ini, bekerja sama dengan pemerintah desa, kader kesehatan, dan masyarakat setempat.

Puskesmas Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, menangani 19 Desa yaitu Desa Tosale, Tolongano, Bambarimi, Salumpaku, Lumbumamara, Salungkaenu, Tanahmea, Lalombi, Watatu, Surumana, Mbuwu, Malino, Lumbutarombo, Lumbulama, Lumbulara, Lembasada, Sarumbaya, Salusumpu, dan Tanampulu.

Program kerja Puskesmas Lembasada dalam menangani stunting dapat di cegah dengan beberapa upaya di antaranya yaitu, memberikan Asi eksklusif pada bayi dan balita, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi dan balita, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan edukasi dan penyuluhan terkait stunting, memberikan PMT pemulihan, melakukan PMT ibu hamil, melakukan pelatihan kader posyandu, pengadaan pengukuran timbang dan tinggi badan pada bayi dan balita, melakukan kelas ibu hamil dan memberikan makanan-makanan bergizi pada bayi dan balita pada saat melakukan posyandu.

Waktu penyelenggaraan posyandu bayi dan balita di Puskesmas Lembasada dilakukan satu bulan sekali di setiap Desa dan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh petugas puskesmas dan kader sehingga dapat memudahkan petugas kesehatan dan masyarakat untuk mengingat waktu pelaksanaan posyandu bayi dan balita. Tempat penyelenggaraan posyandu berada pada lokasi yang mudah dijangkau oleh

masyarakat. Posyandu berlokasi di setiap desa/kelurahan/RT/RW atau dusun, tempat khusus yang ditetapkan masyarakat dan petugas kesehatan. (Kemenkes RI, 2012).

Kasus stunting di wilayah kerja Puskesmas Lembasada kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala tidak terlepas dari kondisi lingkungan dan karakteristik masyarakat setempat, antara lain rendahnya pemahaman keluarga tentang gizi seimbang dan keterbatasan ekonomi yang menyulitkan penyediaan makanan bergizi.

METODE

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berbagai dokumen-dokumen dan informasi penelitian sebagai alat perolehan data akan diambil hingga cukup di analisa berdasarkan prosedur dari prinsip kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono:2015).

Definisi tersebut menyatakan metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna paradigma sebelumnya disebut paradigma postpositivisme, di mana dalam memandang gejala lebih bersifat tunggal, statis, dan konkrit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan jumlah stunting di Puskesmas Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, semakin meningkat menyebabkan terjadinya masalah yang tidak dapat dihindari. Masalah tersebut di antaranya masalah ekonomi dan kesehatan. Salah satu masalah yang saat ini sedang difokuskan di Puskesmas Lembasada yaitu Masalah Stunting.

Penelitian dari informan terhadap Implementasi Kebijakan pencegahan Stunting di Puskesmas Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, peneliti ini telah melakukan wawancara mendalam dengan memperhatikan 6 indikator yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yang di kemukakan Van Meter and Varn Horn yaitu :

Ukuran dari suksesnya sebuah kebijakan implementasi adalah dari tujuan dan bagaimana kebijakan itu dilahirkan, dengan itu kinerja dari implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan dari kebijakan yang telah ada, sebuah kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila antara tujuan dan implementasi kebijakan telah sesuai. Dari dimensi Standar dan sasaran kebijakan ini, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung di dalamnya yaitu bagaimana Standar operasional yang dilakukan pencegahan stunting dan siapa saja sasaran dari kebijakan Peraturan Bupati Donggala Nomor 29 Tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting secara terintegrasi.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam

menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan kuantitas dari sumber daya-daya nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk dijalankan.

Aspek sumber daya manusia tidak hanya termasuk yang memiliki kendala, tetapi pada sumber daya lain yang perlu di perhitungkan ialah Sarana dan prasarana. Karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah terpenuhi kemudian sarana dan prasana tidak memadai, maka akan menjadi persoalan untuk merealisasikan apa yang hendak di tuju.

Implementasi kebijakan publik akan sangat di pengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan di laksanakan, pada beberapa kebijakan di tuntut pelaksana yang bertujuan untuk mengubah perilaku dasar manusia. Namun, pada konteks lain diperlakukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atas luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga di perhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi, maka semakin besar pula agen yang dilibatkan.

Implementasi atau pelaksanaan sebuah program kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi guna menunjang keberhasilan suatu program kebijakan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat, maka asumsinya akan semakin sedikit kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Hal yang perlu juga di perhatikan dalam menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang di tawarkan oleh Van Meter and Varn Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal yang ditawarkan keberhasilan kebijakan publik sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal tersebut.

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan hal terakhir yang diidentifikasi oleh van meter and van horn dapat memengaruhi implementasi kebijakan publik. Variabel disposisi atau sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya harus memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan, pembahasan dan analisis data penelitian maka dapat di simpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Puskesmas Lembasada telah berjalan dengan cukup efektif dan terarah, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang menjadi tantangan dalam upaya mencapai hasil yang maksimal sesuai target yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan 6 aspek implementasi kebijakan menurut Van Meter and Van horn, pelaksanaan program telah berjalan sesuai standar dan arahan Peraturan Bupati Donggala Nomor 29 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting. Hal ini di buktikan

dengan telah adanya keselarasan tujuan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di tingkat desa, pada aspek Standar dan Sasaran Kebijakan, telah ditetapkan target penurunan angka stunting di bawah 14 pada tahun 2025, cakupan pemeriksaan kehamilan 95%, pemberian ASI eksklusif 85% serta partisipasi posyandu 80%. Seluruh indikator telah tertuang dalam dokumen perencanaan desa dan dipahami oleh seluruh pelaksana.

Aspek Sumber Daya, Sarana prasarana posyandu lengkap dan alat ukur standar, SDM puskesmas bnerkompeten sesuai bidang, serta 80% kader telah mengikuti pelatihan teknis. Tersedia juga bantuan suplemen gizi dan makanan tambahan bagi keluarga berisiko. Selain itu, pada aspek Karakteristik Pelaksana, telah terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting secara resmi, dengan pembagian tugas jelas antara pihak Puskesmas, pemerintah desa dan kader. koordinasi berjalan rutin berjenjang dari tingkat desa hingga kabupaten.

Aspek Hubungan Antar Organisasi, informasi disebarluaskan melalui sistem berjenjang seperti rapat desa, pengumuman masjid, kunjungan rumah hingga media komunikasi. Penyuluhan dilakukan rutin bulanan dan jadwal kunjungan disesuaikan dengan tingkat risiko keluarga. Kemudian, kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 75% dan terus meningkat, dukungan sosial lingkungan semakin baik, serta kendala ekonomi dapat minimalisir melalui pemahaman pemanfaatan bahan pangan lokal dan bantuan program desa.

Aspek kecenderungan/disposisi para pelaksana, Aparat dan kader memiliki pemahaman baik bahwa stunting berdampak jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia, sehingga memiliki komitmen tinggi serta menerapkan pendekatan komunikasi yang ramah dan sesuai budaya lokal. Sehingga, kebijakan ini dikatakan belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari sosialisasi kebijakan yang belum merata, keterbatasan fasilitas posyandu, serta belum optimalnya dukungan dan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan stunting.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap implementasi kebijakan pencegahan stunting di Puskesmas Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala khususnya Desa Lembasada, maka peneliti menyarankan agar pelaksana kebijakan dapat berjalan lebih maksimal dan mencapai target yang ditetapkan, sehingga para pelaksana perlu melakukan upaya meningkatkan frekuensi penyebaran informasi dan edukasi, lebih sering memberikan pemahaman kepada ibu hamil, ibu balita, dan seluruh masyarakat mengenai program pemerintah dalam pencegahan stunting, mencakup materi pentingnya ASI eksklusif, gizi seimbang, pola asuh serta kebersihan lingkungan. Hal ini bertujuan agar masyarakat sadar dan berperan aktif dalam menciptakan sumber daya manusia desa yang berkualitas di masa depan. Penyampainya sebaiknya tetap menggunakan bahasa daerah dan pendekatan kekeluargaan agar lebih mudah diterima.

Mengintensifkan sosialisasi secara menyeluruh dan berjenjang, dengan melakukan sosialisasi lebih luas dan berkelanjutan, dimulai dari aparat desa, kader posyandu, hingga keseluruhan sasaran kebijakan. Materi ini disampaikan harus menjelaskan secara rinci tujuan, manfaat, serta dampak jangka panjang dari kebijakan ini, agar baik pelaksana maupun masyarakat memiliki pemahaman yang sama dan komitmen tinggi dalam pelaksanaannya. Sosialisasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan rutin posyandu maupun pertemuan warga dusun.

Mengoptimalkan dukungan sumber daya manusia dan fasilitas, pemerintah daerah dan desa perlu menunjuk penanggung jawab khusus di bidang serta menjamin ketersediaan sumber daya yang memadai. Perlu dilanjutkan pelatihan teknis berkala bagi seluruh kader agar

keahlian semakin meningkat, serta memastikan kelengkapan alat ukur dan fasilitas posyandu selalu terawat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi revisi, Cet. ke-6). Bandung: Alfabeta.
- Andriansyah, & Disson, M. F. (2022). *Konsep dan Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Moestopo Publishing.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2018). *Hasil utama Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Basuki, J. (2019). *Administrasi Publik: Telaah teoritis dan empiris*. Depok: Rajawali Pers.
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2018). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Bandar Lampung: Graha Ilmu.
- Gedeona, H. T., Afandi, M. N., & Mulyadi, D. (2018). *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik: Konsep Dan Praktik Administrasi Dalam Penyusunan SOP, Standar Pelayanan, Etika Pelayanan, Inovasi Untuk Kinerja Organisasi* (Cet. ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Hajar, S. (2022). *Buku ajar pengantar administrasi publik*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Empiris*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018a). *Penanggulangan Stunting Terintegrasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018b). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Periode 2018-2024*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting*. Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat.
- Malawat, S. H. (2022). *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Probolinggo: Mitra Ilmu.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Model Implementasi Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Nita. (2024). *Skripsi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Jenepono*. Repository Universitas Muhammadiyah Makassar. Diakses tahun 2026: https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/41044-Full_Text.pdf?utm_source
- Nugroho, R. (2017). *PublicPolicy* (Edisi ke-6). Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Pasinringi, A. (2014). *Administrasi Publik*. Palu: Edukasi Mitra Grafika.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik: Paradigma administrasi publik, kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Puspita, D. (2024). *Tesis Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kota Palu*. ESTD Perpustakaan Universitas Tadulako. Diakses tahun 2026
https://estd.perpus.untad.ac.id/login/mhsw_detil/B10222050?utm_source
- Rachman Yansarify. (2023). *Skripsi Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau*
- Rahmat, A. (2020). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. ke-22)*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- UNICEF. (2013). *Improving Child Nutrition: The Achievable Imperative For Global Progress*. New York, NY: UNICEF.
- World Health Organization. (2010). *Nutrition Landscape Information System (NLiS): Country Profile Indicators, Interpretation Guide*. Geneva: World Health Organization.